

DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK KABUPATEN/KOTA
LAMPIRAN I PENGAMBIL KEBIJAKAN

NO	IKK	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SKPD
1	2	4	5
1	Keberadaan PERDA IMB	FC Perda IMB atau Perda ttg Pajak dan Retribusi IMB	BAG. HUKUM, BPPT
2	Rasio Rumah ber IMB	Daftar Rincian yang menunjukkan jumlah rumah ber IMB KESELURUHAN sd Akhir tahun 2016 (minimal per Kecamatan) yang ditandatangani Kepala SKPD	BPPT
		Daftar Rincian yang menunjukkan jumlah seluruh rumah sd Akhir tahun 2016 (minimal per Kecamatan) yang ditandatangani Kepala SKPD	DINAS PU, kecamatan
3	Keberadaan PERDA RTRW	FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halam yang menunjukkan ditandatanganinya perda tsb	BAPPEDA, BAG. HUKUM
4	Pengurusan E-KTP	Daftar yang menunjukkan jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP per 31/12/2016 yang ditandatangani Kepala SKPD	Disdukcapil
		daftar yang menunjukkan jumlah penduduk per 31/12/2016 yang ditandatangani Kepala SKPD	Disdukcapil
5	Biaya KTP	FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan besarnya biaya pengurusan KTP dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda tsb	
6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	FC jumlah personil PNS Satpol PP tahun 2016, yang ditandatangani Kepala SKPD	Satpol PP
		FC Jumlah penduduk Kab/Kota per 31/12/2016 dari Dukcapil yg ditandatangani oleh pejabat berwenang (minimal per Kecamatan)	Disdukcapil
7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL atau PMKS	FC Perda ttg PSK, PKL, PMKS	Bag. Hukum
8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	FC Perda Kebersihan	Bag. Hukum
9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007	FC Bukti Penyerahan LPPD 2016 kepada Gubernur	Bagian Pem
10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006	FC Bukti Penyerahan Laporan Keuangan Kab/Kota TA 2016 kepada BPK RI	BPKAD
12	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	FC Program setiap Urusan yang ada di dalam RPJMD/RKPD	Bappeda
		FC. Laporan Pelaksanaan SPM Tahun 2016 yang ditandatangani Kepala SKPD	Bag. Organisasi
13	Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	FC MOU dengan pemerintah daerah lain yang masih berlaku pada tahun 2016	Bagian Pem
14	Kesesuaian prioritas pembangunan	FC Daftar Prioritas Daerah yang tercantum dalam RKPD 2016 yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional	Bappeda
15	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Check pada LPPD 2016	Bag. Pem
16	Waktu penetapan PERDA APBD 2016	FC halaman depan (cover), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya Perda Penetapan APBD Murni TA 2016	BPKAD, Bag. Hukum
17	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP	FC Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagian Hukum, BPKAD

NO	IKK	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SKPD
1	2	4	5
18	Belanja untuk pelayanan dasar	FC Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK	Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Badan Lingkungan Hidup Dinas PU Dinas Sosial Disnakertrans Diskopdagrin Satpol PP Disdukcapil
19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan		
20	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	FC Perda Urusan atau Perda Pelayanan Publik /Peraturan Bupati ttg Pelayanan Publik	Bag. Hukum
21	Rasio PNS terhadap penduduk	Daftar Jumlah PNS Kab/Kota Per SKPD per 31/12/2016 dari BKD yg ditandatangani pejabat berwenang	BKD
		Daftar Jumlah penduduk Kab/Kota per 31/12/2016 dari Dukcapil yg ditandatangani oleh pejabat berwenang	Disdukcapil
22	Keberadaan sistem informasi kepegawaian	Print Out dari print screen menu aplikasi simpeg	BKD
23	Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007	FC Perda tentang SOTK sesuai dengan PP No.41 Tahun 2007, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang	Bagian Organisasi, Bagian Hukum
24	Jumlah perda tahun 2016 (Inisiatif DPRD Kab/Kota)	FC. Perda yang ditetapkan Tahun 2016	Bagian Hukum
25	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2016	FC Surat Keputusan DPRD ttg Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prolegda) Tahun 2016 Daftar Raperda yang diusulkan ke DPRD tahun 2016 yg ditandatangani oleh pejabat berwenang	Bagian Hukum
26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	FC Surat Keputusan DPRD ttg LKPJ tahun sebelumnya	Bagian Hukum, Setwan
		FC Produk Hukum Pemda ttg tindaklanjut Keputusan DPRD	
27	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Daftar Keputusan Bupati Tahun 2016 yang ditandatangani pejabat berwenang	Bagian Hukum
28	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Daftar Peraturan Bupati Tahun 2016 yang ditandatangani pejabat berwenang	Bagian Hukum
29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Daftar perda yang dikirim untuk dievaluasi oleh pemerintah yang ditandatangani oleh pejabat berwenang	Bagian Hukum
30	Keberadaan PERDA/Perbup tentang konsultasi publik	FC. Perda Konsultasi Publik, Peraturan Bupati ttg Konsultasi Publik, Berita Acara pelaksanaan Konsultasi Publik yang dilengkapi daftar hadir	Bagian Hukum, Setwan, Bappeda
31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro	Print Out Halaman depan Web	Kominfo
32	dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota 2016 setelah Audit BPK RI	BPKAD
33	Belanja Publik terhadap DAU		
34	Belanja Publik terhadap total APBD		
35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD		
36	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten tahun 2015	BPKAD

NO	IKK	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SKPD
1	2	4	5
		FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten tahun 2016	
37	SILPA thdp total pendapatan	Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota 2016 setelah Audit BPK RI	BPKAD
38	Realisasi belanja thd anggaran belanja		
39	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Hasil rekonsiliasi Inspektorat dan BPK RI terkait jumlah temuan BPK RI per 31/12/2015, dan berapa dari jumlah tersebut yg di tindaklanjuti di tahun 2016	Inspektorat
40	Realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD	Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota 2016 setelah Audit BPK RI Potensi PAD yang ada dalam RPJMD	Bagian Keuangan
41	Peningkatan PAD	Laporan Realisasi Anggaran Kab/Kota 2016 setelah Audit BPK RI	Bagian Keuangan
42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2016.	FC penghargaan yang diterima Kabupaten dari pemerintah pusat pada tahun 2016	Bag. Humas Protokol
43	Keberadaan E-procurement	Print out proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari Pengumuman sampai dengan Penetapan Pemenang.	ULP
		FC halaman depan (cover), halaman pertama dan halaman ditandatangani perda tentang E-Procurement	ULP
44	Jumlah persetujuan investasi	Daftar ijin dan realisasi Investasi yang dikeluarkan oleh SKPD yg mengelola investasi PemKab/Kota pada tahun 2016 yang ditandatangani Kepala SKPD	Bag. Ekbang

NO	IKK	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SKPD
1	2	4	5

